

**EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KOTA TANPA
KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN SIDEREJO
HILIR KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

SKRIPSI

Oleh:

ADE TYA DWI PUTRI
NPM 1403100100

**Program Studi Administrasi Negara
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : **ADE TYA DWI PUTRI**
N P M : 1403100100
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN SIDEREJO HILIR KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

Medan, 21 Mei 2018

Pembimbing



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.PD

Dekan



Dr. RUDIANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

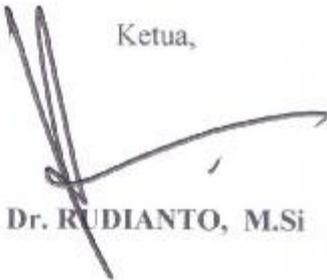
Nama Lengkap : **ADE TYA DWI PUTRI**
N P M : 1403100162
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

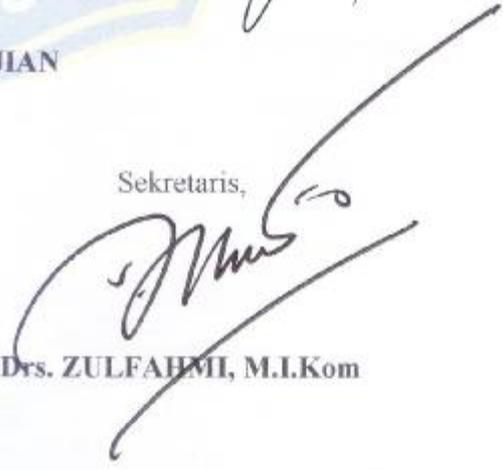
PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.PD** (.....)
PENGUJI II : **Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.SI** (.....)
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.SOS, M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. RUDIANTO, M.Si

Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Dengan ini saya, ADE TYA DWI PUTRI, NPM : 1403100100 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat serta karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaang di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila ditemukan dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sangsi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaang yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan tanskip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018

Yang Menyatakan



ADE TYA DWI PUTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Tagline: *Cerdas & Terpercaya*
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ADE TYA DWS PUTRI
 NPM : 14103100100
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tambung

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
	10/ Maret 2018	Perbaikan Bab 3, Kategorisasi	f
	12/ Maret 2018	Perbaikan Bab 4	v
	19/ Maret 2018	Perbaikan Bab 4 (Deskripsi) a.	f
	20/ Maret 2018	Perbaikan Bab 4 (Deskripsi) a.	f
	20/ Maret 2018	Perbaikan Bab 6. Analisis	f
	22/ Maret 2018	Perbaikan Analisis akhir	f
	23/ Maret 2018	Absarok & bab 5 Kesimpulan (t)	f
	24/ Maret 2018	ACC Skripsi	f

Medan, ... 27 Maret 2018

Dekan,

 Dr. KURNIANTO M. Si

Ketua Program Studi,

 (NAILI KHAIPTAH S.P.H.pd)

Pembimbing ke :

 (ANANDA MAHADEWA S.Sos) M. Sp

**EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI KELURAHAN SIDEREJO HILIR
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG**

OLEH

**ADE TYA DWI PUTRI
1403100100**

ABSTRAK

Pelaksanaan suatu pembangunan tidak hanya dilakukan suatu instansi pemerintah akan tetapi suatu lembaga atau organisasi pemerintahan, dimana pelaksanaan ini belum mampu melaksanakan sebuah agenda kerja ataupun program kerja. Pelaksanaan lembaga pemerintahan khususnya disuatu tingkat lingkungan dirasa mampu bekerja sangat baik karena langsung berperan di cakupan kendalinya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga yang berdiri atas prakarsa masyarakat di tingkat kelurahan atau desa , sehingga mampu turun langsung kemasyarakat dengan melaksanakan sebuah pelaksanaan program kerja. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung dapat dikatakan belum dapat diwujudkan secara efektif dalam melaksanakan program KOTAKU, sesuai dengan beberapa kategorisasi yang berhubungan dengan efektifitas, pencapaian tujuan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan yang belum dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan program yang menjadikan kegiatan program menjadi tertunda dan hasilnya belum dapat diterima baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, dari hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Kata kunci :*Efektivitas, pelaksanaan program kerja*

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis juga sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang di dapatkan melalui proses perkuliahan yang di laksanakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena pengalaman, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih apabila menerima kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik dan menyempurnakan hasil skripsi ini

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Terutama kepada yang teristimewa Orang tua, Ayahanda Suharto dan ibunda Rostina Lubis sebagai orang tua yang sangat berjasa dalam segala hal dari segi material kepada penulis doa, nasihat, dukungan moral yang diberikan . Juga untuk abang penulis M. Taufan Hartin, Angga Prayudha, dan Kakak Nandha Tyara Str.keb penulis yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam penulisan skripsi ini . Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala keindahan hati

mengucapkan terimakasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Alm. Bapak Tasrif Syam M.Si selaku Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga pernah menjadi dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, Ilmu dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
3. Kepada Bapak Rudianto M.Si selaku plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Sp selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Ananda Mahardika S.Sos M.Sp selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan Ilmu yang bermamfaat kepada penulis.
7. Kepada seluruh staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan Informasi kepada penulis.

8. Kepada Bapak Yurian Fahmi Lubis S.STP MAP selaku kepala lurah , Bapak Harry Suryono, Bapak Mirza Marzuki Jr. dan Pegawai Kelurahan Siderejo Hilir yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan Informasi.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas saya IAN Pembangunan B sore terkhususnya kepada AstridDestiara, Fadhilah Rahman, Wahyuni Nst, Zetira Pratiwi, Martin, Andre Wibowo,Aulia dan seluruh teman-teman sekelas saya yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, dan masukan kepada penulis.
10. Kepada teman seperjuangan Venni Malinda, Intan Ayuni pulungan, Jannah, Uci, Shopi, dan Musria yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dan Kepada Seluruh teman-teman IAN angkatan 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya terimakasih kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sampaikan di sini. Semoga dukungan yang anda berikan kelak akan terbalaskan dimasa yang akan datang. Amin Yarobbal Alamin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

ADE TYA DWI PUTRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Efektivitas.....	9
1. Pengertian Eektivitas.....	9
2. Ukuran Efektivitas	11
B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	13
1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	13
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).....	15
C. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).....	17
1. Pengenalan Program.....	17

2. Tujuan Program	22
3. Pelaksanaan Program KOTAKU	23
BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Kerangka konsep	28
C. Defenisi Konsep	29
D. Kategorisasi	31
E. Narasumber	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Deskripsi Hasil Penelitian Berdasarkan Kategorisasi	45
a. Pencapaian Tujuan Program KOTAKU yang dilaksanakan LPM	45
b. Integrasi LPM dalam Melaksanakan Program.....	47
c. Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program KOTAKU ..	49
d. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Program KOTAKU.....	50
B. Pembahasan	51
1. Analisis Hasil Penelitian	51
a. Pencapaian Tujuan Program KOTAKU yang dilaksanakan LPM	51
b. Integrasi LPM dalam Melaksanakan Program	52

c. Sarana dan Prasarana dalam Melaksanakan Program KOTAKU	54
d. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan yang baik adalah salah satu pengelolaan administrasi publik yang sedang berkembang pada saat ini, tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, adanya pengaruh globalisasi pola-pola lama penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Karena itu tuntutan merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Peranan pemerintah banyak menjadi sorotan akhir - akhir ini terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan, rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Pembicaraan mengenai peranan pemerintah tidak lepas dari penilaian pengelolaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi atau operasi organisasi, semakin baik pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi maka semakin baik pula hasilnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 pasal 10 tentang

Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Program pembangunan kelurahan adalah suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 secara eksplisit mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, dimana dalam penjelasan pasal 108 dinyatakan bahwa di desa dengan dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sedangkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan pasal-pasal mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD yang ada sampai saat ini LPM dipakai sebagai pengganti nama LKMD.

LPM dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-

keepakatan nasional tentang keberadaan membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu lembaga di tingkat kelurahan yang tingkatnya sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat salah satu sebagai fasilitator dalam penggerak suatu program dan kegiatan agenda pemerintahan di tingkat kelurahan/desa, LPM sendiri membantu BKM dalam melaksanakan setiap kegiatannya dikhususkan dalam program pemerintah yang baru yaitu program KOTAKU program yang disempurnakan dari program – program sebelumnya.

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang berisikan tentang kelayakan dan Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait dengan Undang-Undang tersebut maka lahirlah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu untuk mengentaskan masalah pembangunan perumahan yang tidak layak huni serta menentaskan masalah-masalah lainnya, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui

pengecegan dan peningkatkan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha, serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) tentu di dukung oleh anggota pegawai pemerintahan disetiap daerahnya ataupun tingkat pemerintahan.

Tingkat Pemerintahan khususnya di Kelurahan memiliki organisasi atau lembaga kelurahan seperti : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TIM Penggerak PKK, Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dll. Lembaga ataupun organisasi kelurahan ini memiliki peran serta tugas dalam setiap agenda pembangunan atau kegiatan program kerja di tingkat kelurahan.

Terkait dengan tugas dan peran dalam kegiatan program kerja di kelurahan, Program Kotaku adalah program baru yang di sebar di tingkat Kota di Indonesia, khususnya kali ini di tingkat kelurahan yang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama Badan Keswadayaan Masyarakat melakukan Program Kotaku dimana pelaksanaan nya beriringan dan membutuhkan kerja

sama antara kedua organisasi ini, khususnya LPM sendiri yang menjadi Lembaga kelurahan yang seharusnya dapat berperan secara efektif dalam melaksanakan program ini sehingga program ini dapat berjalan baik dan dapat mencapai tujuannya.

Hadirnya Program KOTAKU diharapkan dapat menata perkotaan yang anti kumuh dan layak huni dan diharapkan mengedepankan kelayakan dari segi fungsi, infrastruktur, sarana sarana yang diinginkan, dengan adanya program ini tentunya diharapkan mampu mengatasi masalah masalah pembangunan. Kelurahan Siderejo Hilir adalah salah satu kelurahan yang berdomisili di Kota Medan, Kota Medan Sendiri adalah Kota terbesar di Pulau Sumatera yang tentunya mengedepankan Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi, dan Indah sebagai motto dari Kota Medan, dimana motto kota Medan ini sepertinya belum berhasil karena banyak masalah pembangunan yang belum terselesaikan salah satu contohnya seperti pembangunan drainase, jalan rusak, bangunan dan fasilitas yang belum lengkap untuk masyarakat, dll. Pembangunan Drainase adalah salah satu dari beberapa contoh masalah yang ada di lingkungan kelurahan, salah satunya di kelurahan Siderejo Hilir.

Untuk mengatasi segala permasalahan Infrastruktur yang belum memadai ataupun perbaikan perbaikan pembangunan maka diharapkan Program KOTAKU dapat menjadi solusi dari masalah pembangunan, dimana program ini dilaksanakan oleh pihak pihak terkait yaitu anggota pemerintah kelurahan dan Lembaga Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). pelaksanaan LPM sebagai mitra dari lurah didalam sistem pemerintahan

kelurahan belum begitu menunjukkan hal-hal yang menuju pada orientasi pembangunan yang baik. Masih terdapat program-program pembangunan yang berbasis pemberdayaan belum dilaksanakan secara prioritas, bahkan ada yang sudah dilaksanakan tetapi tidak menunjukkan kualitas yang baik, Hal ini menekankan fungsi pemberdayaan yang menjadi tanggung jawab LPM bersama Pemerintahan kelurahan belum terlaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab LPM itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Melaksanakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung”** .

B. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2010:35) rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.

Bedasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah: **“Bagaimana Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Melaksanakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Bedasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Melaksanakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberkan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b) Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ilmu administrasi negara serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang konsep efektivitas, konsep lembaga pemberdayaan masyarakat, konsep program Kota tanpa kumuh

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, defenisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan lokasi penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan sarana-sarana yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Siagian (2002:24) bahwa efektivitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas Menujukkan Sebuah keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran maka tinggi pula efektivitasnya.

Menurut Handoko (2001:44) mengatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Martoyo (2002:4) mengatakan bahwa efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang sempurna.

Sedangkan Menurut Sumaryadi (2005:105) mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran yang telah dicapai. Sasaran yang dimaksud adalah visi, misi, ataupun fungsi dari sebuah organisasi yang dimana ketika tercapai sasaran dari suatu organisasi maka dapat dikatakan suatu organisasi

tersebut efektif. Menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya.

Menurut Gie (2000:260) bahwa efektivitas bermamfaat dalam memberikan pelayanan pada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya seperti halnya dengan organisasi yang bersangkutan, Efektivitas memiliki sifat utama bagi organisasi antara lain:

1. Berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu.
2. Menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan.
3. Menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dan menjalankan program
4. Meningikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Gie (2007:2) bahwa Efektivitas mengandung arti terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Bahwa tindakan atau perbuatan yang efektif adalah sebuah pekerjaan yang menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang itu, karena suatu pekerjaan pasti bertujuan untuk melakukan hasil yang efektif dan efisien.

Menurut Silalahi (2002:10), efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Demikian maka efektivitas dalam organisasi

birokrasi dapat dilihat pula bagaimana birokrasi itu merespon berbagai tuntutan lingkungan masyarakat yang menginginkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan pelayanan publik.

Bedasarkan pendapat para ahli efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam sebuah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan sasarannya, untuk menghasilkan sejumlah jasa ataupun pekerjaan yang telah ditentukan. yang dimana dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah pengukuran hasil kerja sebuah organisasi dalam melaksanakan sebuah konsep kerja yang dapat dinilai keberhasilan pekerjaan ataupun hasil dari pencapaian tujuan kerja yang dilaksanakan, begitujuga di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung dalam melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) haruslah mencapai tujuan-tujuan dalam program sehingga dapat diterima masyarakat hasil pelaksanaannya dengan baik.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan,

Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan program Kota tanpa kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung yang bertujuan melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan sasarannya yaitu pelaksanaan program, sehingga program tersebut terlaksana dengan baik dan dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat.

B. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa “Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai

mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat.

Sebelum di sebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama di bentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Partisipasi masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama, masyarakat dapat hidup bila memiliki

kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya.

Koentjaraningrat (2002:144) menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau saling berinteraksi. Salam (2007:262) mengungkapkan bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara Pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat sipil tersebut pada umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi dan advokasi partisipasi melalui mobilisasi.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Pengembangan kemitraan
- d. Pemberdayaan masyarakat dan
- e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang dipantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. lebih sesuai dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Hubungannya dengan pembinaan, yang menjadi sasaran pembinaan khususnya dalam pembinaan masyarakat adalah mentalitasnya. Mentalitas yang belum sadar harus dibangun, yang tidak sesuai dengan pembangunan harus dirubah, yang belum beres harus ditertibkan dan yang masih kosong harus diisi.

C. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

1. Pengenalan Program

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang berisikan tentang kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan kawasan dan perumahan yang layak huni dan untuk menanggulangi masalah kekumuhan atau prasarana di bidang perkotaan dan pemukiman maka lahirlah Program KOTAKU yang merupakan salah satu upaya strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas (berbasis komunitas) maka KOTAKU akan menangani kumuh dengan membangun platformkolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat.

KOTAKU dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 23.656 Hektare. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi

untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan KOTAKU meliputi tahapan pendataan, dimana lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Setelah itu, disusun dokumen perencanaan yang terintegrasi antara dokumen perencanaan masyarakat dengan dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Program ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Karena, BKM sudah berpengalaman dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, diharapkan peran BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dan peran BKM ini di-

“revitalisasi” terlebih dahulu, dimana sebelumnya berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh.

Sumber pembiayaan KOTAKU berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu juga kontribusi pemerintah daerah, melalui APBD maupun swadaya masyarakat, akan menjadi satu kesatuan pembiayaan guna mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud, yakni *pertama*, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. *Kedua*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Oleh karenanya penjabaran atas tujuan program, adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Indikator tersebut adalah sebagai berikut

1. Bangunan Gedung

- a) Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk
 - b) Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang
 - c) Ketidak sesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
- a) Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
 - b) Lebar jalan yang tidak memadai
 - c) Kelengkapan jalan yang tidak memadai
3. Penyediaan Air Minum
- a) Ketidaktersediaan akses air minum
 - b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
 - c) Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan
4. Drainase Lingkungan
- a) Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
 - b) Menimbulkan bau
 - c) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
5. Pengelolaan Air Limbah
- a) Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah
 - b) Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku
 - c) Tercemarnya lingkungan
6. Pengelolaan Persampahan
- a) Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan

- b) Ketidakterediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- c) Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

7. Ruang Terbuka Publik

- a) Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH)
- b) Ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau/ruang terbuka

8. Pengamanan Kebakaran

- a) Ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
- b) Ketidakterediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai

2. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- a) Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
- b) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik;
- c) Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- d) Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh; dan
- e) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “*outcome*” sebagai berikut:

- a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik).
- b) Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
- c) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan
- d) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh.

3. Pelaksanaan Program KOTAKU

Pelaksanaan Program KOTAKU tingkat kota dipastikan terjadi memoradum (kesepakatan) terhadap data *baseline* kumuh yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, pengukuran proses kegiatan dan masuk dalam sistem informasi kota serta memastikan verifikasi data *baseline* terhadap kategori kumuh kota. Tahap pelaksanaan mencakup:

1. Penganggaran

Setiap program dan kegiatan (prasarana sarana, sosial, ekonomi termasuk perumahan dan legalisasi tanah, dll) yang sudah direncanakan maka setiap tahun dimasukkan ke dalam proses penganggaran tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi/Pusat (untuk program dan kegiatan yang dalam rencana sudah disebutkan untuk meminta dukungan dari pemerintah Provinsi dan Pusat). Untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pokja PKP dapat bekerjasama dengan TAPD sehingga dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan dapat menjadi salah satu dokumen acuan sebagai pelengkap RPJMD dan Renstra SKPD dalam setiap pembahasan anggaran antara TAPD dengan SKPD. Perkiraan kebutuhan pembiayaan program KOTAKU dengan sumber-sumber pendanaannya dituangkan dalam Pedoman Teknis Program KOTAKU.

2. Pra-konstruksi

Setelah penyusunan rp2kp-kp dan rencana/desain kawasan maka kemudian pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan DED (peta 1:100 – 1:20) atau perencanaan detail infrastruktur untuk infrastruktur primer dan sekunder prioritas yang terhubung dengan sistem infrastruktur di kawasan kumuh dan mempengaruhi secara langsung efektifitas penanganan di kawasan kumuh.

Pemerintah Kabupaten/Kota merekrut konsultan yang akan menyiapkan DED infrastruktur. Konsultan Management Teknis (KMT) yang direkrut Pemerintah Pusat akan mensupervisi DED yang disiapkan oleh konsultan DED tersebut.

3. Konstruksi

Memasuki pelaksanaan konstruksi infrastruktur, pemerintah Kabupaten/Kota merekrut pihak ketiga (kontraktor dan konsultan supervisi) sesuai dengan prosedur pelelangan public. Pelelangan konstruksi infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui National Competitive Bidding di Kabupaten/Kota . Pemaketan kontrak untuk pekerjaan infrastruktur akan berdasarkan jenis pekerjaan, sumber pendanaan, dan efisiensi. Mengingat pekerjaan yang dilaksanakan akan menggabungkan berbagai sumber pendanaan maka satu kontrak untuk seluruh pekerjaan tidak selalu bisa dilaksanakan. Dimana pemerintah daerah kurang memiliki kapasitas untuk pengadaan maka pengadaan akan dilakukan di tingkat Provinsi atau Pusat.

Pokja PKP memantau setiap usulan kegiatan yang akan dilelangkan atau konstruksi pada setiap SKPD melalui forum pertemuan lintas sektor. KMT memastikan proses dan kualitas konstruksi memenuhi syarat yang ditetapkan. Tata cara pengadaan dan konstruksi untuk jenis infrastruktur yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU untuk Kabupaten/Kota terpilih disediakan dalam SOP atau POS terpisah.

Dalam tahapan- tahapan pelaksanaan program KOTAKU dilaksanakan pemetaan kategori kekumuhan, penentuan sasaran dan tujuan pelaksanaan, dan

proses pelaksanaan pengerjaan meliputi perbaikan Infrastruktur dan program KOTAKU memiliki strategi dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan.
7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

BAB III

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya keproses analisis data. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang dan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2015:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, sebagaimana lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *surposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen maka

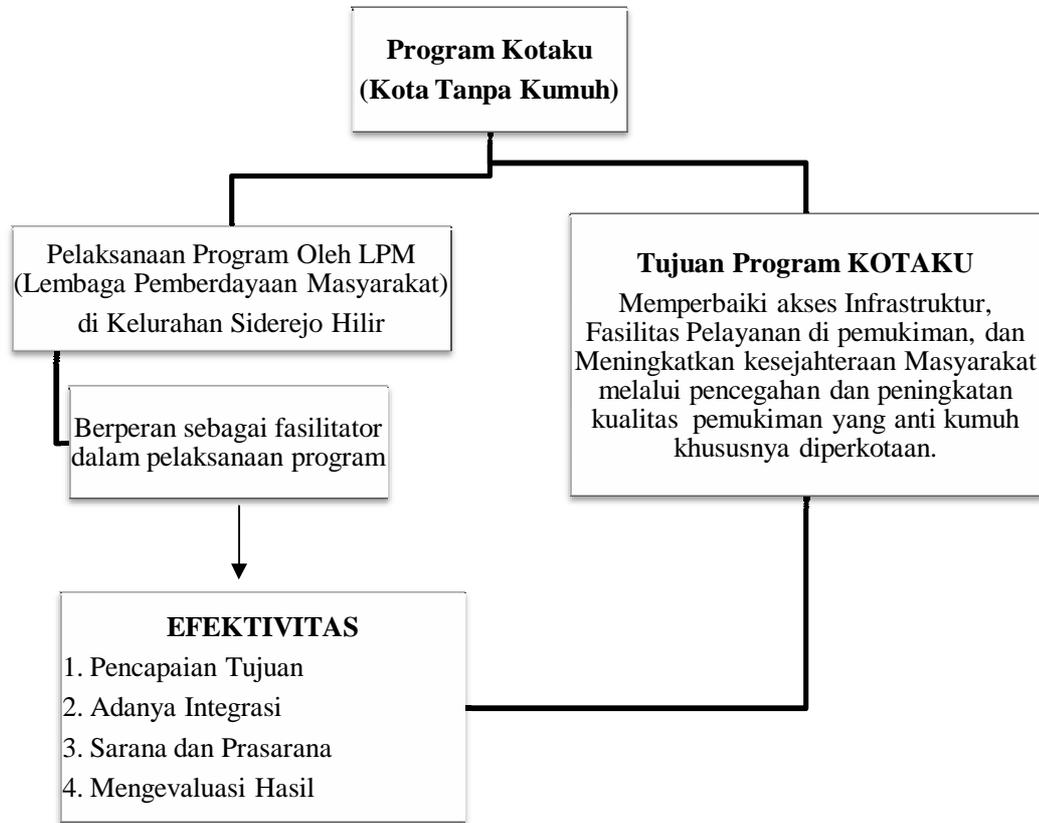
peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkaji situasi sosial agar lebih bermakna.

Dengan menggunakan cara deskriptif analisis kualitatif metode ini dapat lebih efisien dengan memperoleh dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara terbuka di keadaan sosial atau sekitar.

B. Kerangka konsep

Sugiyono (2010:66) mengatakan bahwa kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih, penelitian memerlukan mengemukakan deskripsi teoritis dalam pembahasannya untuk masing-masing variabel, juga argumentasi atau pendapat terhadap besaran variabel yang diteliti. Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 3.1 Kerangka Konsep



C. Defenisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek kondisi, situasi, dan lain-lain. Defenisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa saja yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengganggu tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefenisikan sebagai berikut:

- 1) Efektivitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana , dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas Menunjukkan Sebuah keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran maka tinggi pula efektivitasnya.

- 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah salah satu lembaga di tingkat kelurahan yang ikut serta dalam menangani ataupun menjalankan setiap agenda, program kerja yang ada di kelurahan, sebagai fasilitator penggerak masyarakat, pembinaan, dan lain-lain.
- 3) Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah program yang disempurnakan dari program-program kemandirian masyarakat sebelumnya (PNPM mandiri dan P2KP), program ini bertujuan meningkatkan pembangunan Infrastruktur, pembangunan rumah yang layak dan anti kumuh, meningkatkan sarana-prasarana yang belum memadai, sistem drainase, dll. Program ini menekankan kepada kemandirian masyarakat yang digerakkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) khususnya di kelurahan yang dapat menjadi fasilitator dalam setiap pelaksanaan agenda dalam program.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

- 1) Pencapaian tujuan LPM dalam melaksanakan program KOTAKU menjalankan tahap-tahap untuk mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tercapainya tujuan program.
- 2) Intergrasi penyeragaman dan penyatuan LPM dalam berintegrasi dengan menjadikan masyarakat sekaligus menjadi objek dalam pembangunan dan menjadi subjek dalam pelaksanaan program.
- 3) Sarana dan Prasarana yang di pakai atau dimiliki sehingga dapat mendukung LPM dalam proses pelaksanaan program dan tercapainya tujuan program.
- 4) Mengevaluasi Hasil program yang dilaksanakan oleh LPM dalam mencapai target yang di sasarkan dan ketentuan yang berlaku.

E. Narasumber

Menurut Lexi Moleong (2000:132) narasumber adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Selain itu dalam menentukan narasumber dapat menggunakan metode *snow ball sampling* yaitu metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari informan ataupun narasumber yaitu orang-orang yang terlibat pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kriteria dalam memilih seorang narasumber adalah :

1. Memiliki Posisi yang penting di instansi yang bersangkutan
2. Mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti
3. Ikut dalam pelaksanaan kegiatan ataupun sebagai objek dalam kegiatan

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

1. Himpun Suriadi selaku staf Kelurahan di Kelurahan Siderejo Hilir
2. Mirza Marzuki Jr selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Siderjo Hilir
3. Harry Suryono selaku Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat ataupun Tim program KOTAKU dari Kelurahan Siderejo Hilir
4. Bapak H.ahmad selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir
5. Ibu Natalia selaku Masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:308) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder, dengan menggunakan teknik :

- a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau tempat penelitian, melalui wawancara. Menurut Esterberg dalam buku Sugiono(2015:317) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, khususnya tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun data elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian di analisis atau di uraikan, dibandingkan, dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis padu dan utuh.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen (1982) sebagaimana dikutip Moleong (2007:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis,

kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. McDrury (Collaborative Group Analysis of Data, 1999) seperti yang dikutip Moleong (2007:248) tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a) Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data
- b) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c) Menuliskan 'model' yang ditemukan.
- d) Koding yang telah dilakukan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata- 43 kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Data yang diambil disajikan berdasarkan fakta yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga member gambaran yang jelas tentang Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) bagi masyarakat Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor Lurah, Bertempat di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Penelitian akan dilaksanakan sejak bulan februari sampai dengan bulan maret 2018.

I. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Siderejo Hilir adalah salah satu dari 7 (Tujuh) Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Tembung, yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah lebih kurang 106 Ha terdiri dari 14 (Empat Belas) Lingkungan yang dikepalai oleh kepala lingkungan masing-masing. Dengan batas-batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan sebelah Utara kelurahan Indra Kasih, sebelah Barat dengan kelurahan Tegal Rejo, sebelah Timur kelurahan Percut Sei Tuan.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Kelurahan Siderejo Hilir berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 7 orang PNS.

- a. Berdasarkan struktur organisasi Kelurahan Siderejo Hilir yang duduk dalam jabatan struktural dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Kelurahan Siderejo Hilir

Bedasarkan Jabatan Struktural 2018

No	Uraian	Jumlah Pegawai 2018	Keterangan
1	Golongan II a	2	
2	Golongan III a	4	
3	Golongan III b	1	
Jumlah		7	

Sumber: Data Kelurahan Siderejo Hilir Kota Medan

- b. Keadaan pegawai Kelurahan Siderejo Hilir berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Kelurahan Siderejo Hilir 2018

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pengatur	Golongan II	2
2	Penata	Golongan III	5
		Jumlah	7

Sumber: Data Kelurahan Siderejo Hilir Kota Medan

- c. Berdasarkan Pendidikan

Klasifikasi pendidikan formal pegawai kelurahan Siderejo Hilir untuk mendukung kelancaran tugas dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Sarjana (S1)	6
2	SLTA	1

Sumber: Data Kelurahan Siderejo Hilir Kota Medan

2. Kelembagaan Pemerintah Kelurahan Siderejo Hilir

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan

tidak berhak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Susunan Organisasi Kelurahan Siderejo Hilir Berdasarkan UU No.12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagai berikut:

a) Kepala Kelurahan

Kepala Kelurahan Siderejo hilir yang dipimpin oleh Lurah, memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pelayanan administrasi publik, menyelenggarakan pelayanan teknis kesekretariatan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan maupun melalui rapat staf dalam rangka pembinaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah, menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

b) Sekretaris Lurah

Sekretaris Lurah dalam tugasnya melakukan penyusunan rencana dan kegiatan Sekretariatan, pengkoordinasian penyusunan rencana program kelurahan, Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan kelurahan yang meliputi (administrasi umum, kepegawaian, dan kerumah tanggan kelurahan), pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaankoordinasi penyelenggaraan tugas – tugas kelurahan, melakukan penyiapan (bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian), melaksanakan

(monitoring, evaluasi, dan pelaporan), serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan

Mempunyai tugas meliputi, penyusunan rencana program dan kegiatan seksi Tata Pemerintahan, menyusun Tata petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan, menyelenggarakan pelayanan kependudukan seperti (KTP, KK, mencatat surat kelahiran, dan kematian), melakukan persiapan bahan (pembinaan kegiatan sosial, politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa), melaksanakan proses pelayanan administrasi lainnya yang berada pada lingkup Tata Pemerintahan, melakukan pencatatan monografi kelurahan, membantu tugas di bidang pemungutan PBB. Serta melakukan persiapan bahan untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

d) Kepala Seksi (KASI) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam hal ini Kepala Seksi (KASI) Ketentraman dan Ketertiban umum di Kelurahan Siderejo Hilir bertugas melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, menyusun petunjuk teknis lingkup keamanan dan ketertiban umum, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban umum, menyiapkan bahan pembinaan perlindungan masyarakat, menyiapkan pembinaan siskamling, penyelenggaraan kegiatan administrasi ketahanan sipil, melakukan persiapan bahan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam penyelenggaraan (ketertiban umum, keamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya, pelayanan masyarakat lingkup ketertiban dan ketentraman,

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah/Plt.Lurah dalam lingkup Keamanan.

e) Kepala Seksi (KASI) Pembangunan Sosial

Kepala Seksi (KASI) Pembangunan Kelurahan Siderejo Hilir mempunyai tugas antara lain mengumpulkan, mengelola, dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan, melaksanakan, membina, dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah LKMD, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pada atasan secara rutin sebagai bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dibidang pembangunan, melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan, melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, KB, dan pendidikan masyarakat.

f) Kepala Lingkungan (Kepling)

Kepala Lingkungan Kelurahan Siderejo Hilir memiliki beberapa tugas antara lain membantu pelaksanaan kepala kelurahan dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong-royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat, membantu Kepala Kelurahan dalam pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan RT / RW di wilayah kerjanya melaksanakan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya.

3. Sarana dan Prasarana

Kelurahan Siderejo Hilir berada di Jalan Dahlia No 33 Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Kode Pos 20222 nomor telepon (061) 6615117. Keberhasilan pembangunan dan pengembangan lingkungan kelurahan tidak bisa terlepas dari keberadaan sarana dan prasarana pendukungnya. Sarana atau prasarana pendukung yang ada di Kelurahan Siderejo Hilir antara lain dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana di Kelurahan Siderejo Hilir

No	Nama	Keterangan
1	Posyandu	Ada
2	PUSKESMAS	Ada
3	Rumah Ibadah	Ada
4	Sekolah (PAUD-SMA)	Ada
5	Air Bersih	Ada
6	Listrik	Ada

Sumber : Kelurahan Siderejo Hilir

Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki kelurahan Siderejo Hilir sudah cukup baik, dari jalan yang baik dan aktivitas sehari-hari penduduk yang berjalan normal, sarana dan prasarana dapat menjadi pendukung proses pembangunan karena dapat mempengaruhi seseorang ataupun lingkungan masyarakat.

4. Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Siderejo Hilir

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan Siderejo hilir adalah salah satu organisasi pendamping kelurahan yang berperan aktif dalam kegiatan pembinaan, pelaksanaan fungsional, maupun pelaksanaan suatu program

kerja, LPM di kelurahan Siderejo Hilir berfungsi sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan maka peran LPM sebagai fasilitator mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan maupun rencana-rencana pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri dan berkedudukan di kelurahan, LPM kelurahan Siderejo Hilir sendiri memiliki tugas ataupun kegiatan yang meliputi:

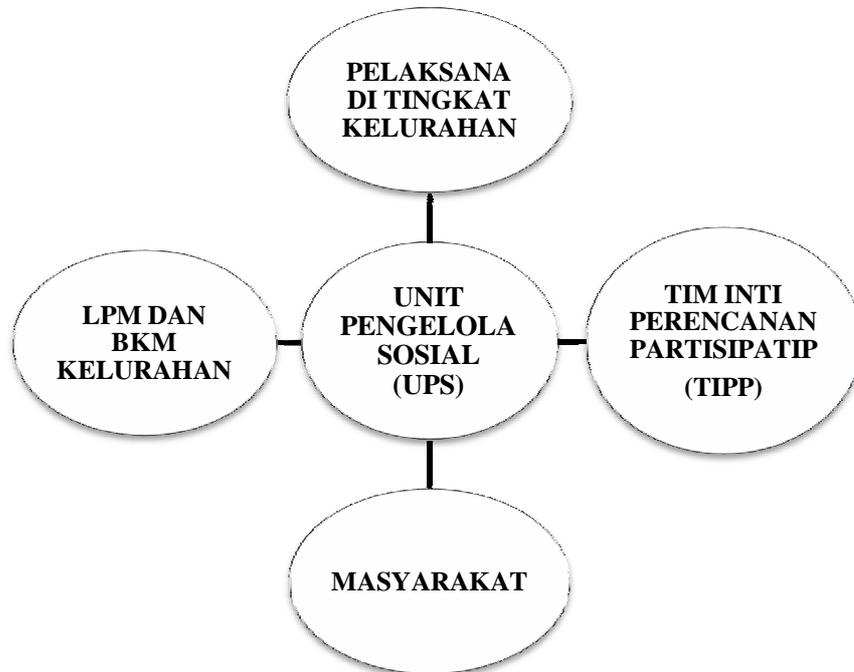
- a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- d) Melakukan Pemberdayaan kepada masyarakat.
- e) Menampung aspirasi dari masyarakat.
- f) Ikut serta dan berpartisipasi dalam MUSREMBANG
- g) Melaksanakan program pemerintah melalui agenda kerja

Bagan 3.3
Struktur Organisasi LPM Kelurahan Siderejo Hilir Kota Medan



5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir

Program KOTAKU di kelurahan Siderejo Hilir telah masuk masa awal pelaksanaan program yaitu proses pelaksanaan yang dimulai dari penataan sasaran program, penyuluhan ataupun sosialisasi, penetapan indikator kekumuhan, serta pada proses pelaksanaan program yang ditujukan kepada sasaran program. Pihak-Pihak yang melaksanakan KOTAKU dapat dilihat melalui bagan 3.4 sebagai berikut :

Bagan 3.4 Pelaksana Program KOTAKU diKelurahan Siderejo Hilir

Untuk pelaksanaan program di Kelurahan Siderejo Hilir yang berperan hanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat yang diketahui Lurah dan juga tim Unit Pengelola Sosial dari pihak pusat program Kota Tanpa Kumuh, seharusnya tersedia Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) tetapi dari kebijakan kelurahan program hanya dilaksanakan oleh badan atau lembaga kemasyarakatan yang di ketahui kelurahan dan diketuai satu pelaksana yang ditunjuk kelurahan sebagai ketua program.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian Berdasarkan Kategorisasi

a. Pencapaian Tujuan Program KOTAKU yang dilaksanakan LPM

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak HimpunSuriadiselaku staf kelurahan dan bapak Mirza Marzuki selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakatpada tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Kelurahan Siderejo Hilir mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan program KOTAKU yaitu dengan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar dikawasan kumuh perkotaan belum sepenuhnya tercapai dilihat dari beberapa kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan lamanya persetujuan dana yang dibutuhkan karena dapat menunjang pelaksanaan pencapaian tujuan ini, pelaksanaan program yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan perbaikan perbaikan sistem drainase dan jalan maupun perbaikan rumah itu sudah dilaksanakan tapi ada juga yang belum terlaksana.

Menurut bapak H. Ahmad selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir pada tanggal 10 Februari 2018 mengatakan pencapaian tujuan program dalam melaksanakan perbaikan infrastruktur dan perbaikan di kawasan kumuh belum berjalan baik dikarenakan ada pelaksanaan yang diberitahukan kepada masyarakat belum terlaksana, masyarakat sudah menunggu hasil pelaksanaan karena dinilai sangat baik untuk diperbaiki . Kegiatan yang dimaksud adalah

perenovasian salah satu rumah masyarakat yang perlu dilaksanakan segera agar terciptalah lingkungan baik dan layak huni bagi masyarakat-masyarakat kelurahan Siderejo Hilir.

Menurut Ibu Natalia selaku masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir pada tanggal 10 Februari 2018 mengatakan pencapaian tujuan program dalam memperbaiki infrastruktur dan menciptakan lingkungan yang anti kumuh belum sepenuhnya didapati hasilnya oleh masyarakat dibuktikan dengan belum terlaksananya pelaksanaan renovasi rumah dan perbaikan sistem drainase yang dilaksanakan oleh para pihak pelaksana.

Sedangkan Menurut Bapak Harry Suryono selaku anggota Badan Keswadayaan Masyarakat dan juga sebagai ketua program KOTAKU di Kelurahan Siderejo Hilir pada Tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Lurah Siderejo Hilir mengatakan bahwa pencapaian tujuan program KOTAKU dalam menuju perbaikan infrastuktur guna melawan kekumuhan khususnya di perkotaan dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Keswadayaan Masyarakat sudah masuk ketahap hampir berhasil karena kegiatan yang dilakukan sudah sesuai meskipun ada kegiatan yang masih tertunda. Dalam mewujudkan tujuan program kita melakukan penentuan objek dan sasaran yang sudah sesuai kategori pelaksanaan, prosedurnya seperti pemetaan tujuan perbaikan, penentuan pengeluaran pelaksanaan program dan proses akhir pelaksanaan dan pelaporan.

Bedasarkan dari jawaban para narasumber dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan program KOTAKU dalam menciptakan lingkungan yang anti kumuh belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh LPM karena ada kegiatan

yang masih tertunda dan terhalang dana dari lamanya persetujuan dari Unit Pengelola Sosial . Akan tetapi mengenai prosedur dan strategi sudah menunjukkan baik dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi program, penentuan sasaran pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

b. Integrasi LPM dalam Melaksanakan Program

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Himpun Suriadi selaku staf kelurahan, bapak Mirza Marzuki selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan bapak Harry Suryono selaku anggota Badan Keswadayaan Masyarakat pada tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Lurah Siderejo Hilir mengatakan bahwa Integrasi dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah baik dinilai dari pelaksanaan program yang diwujudkan dengan bekerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat dengan berbagi peran dan pelaksanaan yang juga mengikutsertakan masyarakat, dengan melakukan koordinasi dan pembagian tugas sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lebih baik, kita merangkul masyarakat dalam pengenalan program lalu menentukan jadwal pengerjaan program sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan program Kota Tanpa Kumuh ini.

Menurut H. Ahmad selaku tokoh masyarakat pada tanggal 10 Februari 2018 mengatakan integrasi dengan masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dinilai baik melalui kegiatan dalam sosialisasi pengenalan program ini merupakan pengerjaan yang membutuhkan swadaya dari masyarakat sehingga dengan bekerja sama dengan para pelaksana sehingga

kegiatan program dapat berjalan dengan baik . Badan Keswadayaan Masyarakat yang membagi tugas dengan masyarakat dalam proses kerja seperti pengadukan semen dalam perbaikan jalan dll.

Menurut Ibu Nataliaselaku masyarakat pada tanggal 10 Januari 2018 mengatakan integrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat dinilai baik seperti dalam kegiatan program kota Tanpa Kumuh lembaga pemberdayaan masyarakat diminta turut berpartisipasi dan mau membantu dalam kegiatan karena proses perbaikan juga dilingkungan rumah masyarakat sendiri, Badan Keswadayaan Masyarakat mendata rumah-rumah dan pengamatan dan meminta kepada masyarakat melaporkan untuk memberi Informasi mana rumah atau jalan yang rusak sehingga dapat diproses untuk ajuan perbaikannya.

Bedasarkan jawaban para narasumber dapat diketahui bawa integrasi sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai suatu organisasi yang melakukan penyeragaman dengan pihak-pihak pelaksana maupun masyarakat dalam melaksanakan program KOTAKU sudah baik karena dapat membagi tugas dan bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat dan mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat turut ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan program.

c. Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Program KOTAKU

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Himpun Suriadi selaku staf kelurahan, bapak Mirza Marzuki selaku ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan bapak Harry Suryono selaku Anggota Badan Keswadayaan masyarakat pada tanggal 7 Februari 2018di Kantor Lurah Siderejo

Hilir mengatakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan program KOTAKU belum dapat menunjang keberhasilan program KOTAKU seperti dalam setiap kegiatan seperti perbaikan jalan yang menggunakan bahan material dan alat-alat bangunan yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan, dimana alat dan bahan bangunan seperti beko, semen, pasir, seng, batu bata, dll ini harus tersedia tetapi sarana dan prasarana ini jumlahnya terbatas dikarenakan budget yang tidak banyak untuk beberapa kegiatan, sementara kegiatan pelaksanaan harus terus berjalan disinilah sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program KOTAKU.

Menurut bapak H. Ahmad selaku tokoh masyarakat dan ibu Natalia selaku masyarakat kelurahan Siderejo Hilir tanggal 10 Februari 2018 mengatakan sarana dan prasarana yang dipakai dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh ini belum dapat terpenuhi dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan bahan material yang menjadi sarana ataupun prasarana ini tidak tersedia padahal kegiatan sudah ditetapkan, seharusnya bahan-bahan material ini harus tersedia sehingga pelaksanaan program ini dapat tepat waktu dan sesuai sasaran penggerjanya agar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat di kelurahan Siderejo Hilir.

Bedasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program, sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan dari pelaksanaan program dinilai dari keterlambatan kegiatan dikarenakan kekurangan bahan dan material dalam kegiatan yang sudah

direncanakan yang akhirnya dapat menunda kegiatan pelaksanaan program yang sudah ditunggu masyarakat hasilnya .

d. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan Program KOTAKU

Menurut bapak Himpun Suriadi selaku staf Kelurahan bapak Mirza Marzuki selaku Ketua LPM di Kelurahan Siderejo Hilir, dan bapak Harry Suryonoselaku anggota BKM sekaligus Ketua Program bapak Harry Suryono pada Tanggal 7 Februari 2018 di Kantor Lurah Siderejo Hilir mengatakan pelaksanaan program KOTAKU berjalan hanya beberapa dari kegiatan program dikarenakan terhalang dana dan sarana yang menjadikan tertundanya kegiatan, dana ini didapatkan dari Unit Pelaksana Sosial yang menyetujui anggaran dari perencanaan budgeting pelaksanaan sehingga harus menunggu proses penyetujuannya sementara pelaksanaan harus terjadi karena sudah disosialisasikan ke masyarakat. Beberapa pelaksanaan kegiatan seperti perbaikan jalan sudah kita lakukan di lingkungan 3 dan 4, perbaikan drainase di lingkungan 9,10,11 juga sudah karena Siderejo Hilir memiliki 12 lingkungan maka sisanya tertunda dan ada juga masih layak.

Sedangkan menurut H. Ahmad selaku tokoh masyarakat dan ibu Natalia selaku masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir pada tanggal 10 Februari 2018 mengatakan bahwa pelaksanaan program KOTAKU ini belum mampu memenuhi apa yang diinginkan masyarakat karena masyarakat membutuhkan perbaikan yang tepat waktu dari tertundanya beberapa kegiatan yang menjadikan program ini belum terlaksana dengan baik padahal masyarakat sangat menerima baik dari dan

pengenalan dan proses pelaksanaan program dan sangat ditunggu hasil pengerjaannya oleh masyarakat.

Sesuai hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan dari mengevaluasi hasil pelaksanaan program oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini dirasa belum berjalan cukup baik karena kegiatan yang tertunda diakibatkan lamanya persetujuan dan dari pihak Unit Pelaksana Program, akan tetapi program ini direspon dengan baik oleh masyarakat dinilai dari partisipasi dan antusias tentang program Kota Tanpa Kumuh.

B. Pembahasan

1. Analisis Hasil Penelitian

a. Pencapaian Tujuan Program KOTAKU yang dilaksanakan LPM

Menurut Handoko (2001:44), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Martoyo (2002:4), efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Bedasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, pencapaian tujuan program KOTAKU yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siderjo Hilir belum sesuai dikarenakan dalam pelaksanaan program mengalami keterlambatan waktu sehingga pelaksanaan program menjadi tertunda, perbaikan drainase sudah dilakukan di beberapa lingkungan tetapi perenovasian

rumah kumuh belum terjadi karena hambatan dana yang belum disetujui oleh Unit Pengelola Sosial, seharusnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat bergerak cepat mengambil tindakan seperti melakukan musyawarah agar dapat menangani keterbatasan dana yang terjadi sehingga kegiatan-kegiatan yang sesuai rencana agar tujuan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan.

Karena terjadinya keterbatasan dana yang terjadi menjadikan suatu kegiatan dapat tertunda maka kegiatan pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perencanaan biaya yang diajukan tidak sesuai dengan jumlah kegiatan yang menjadikan kegiatan tertunda.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber yaitu bapak Himpun Suriadi selaku staf kelurahan di Kelurahan Siderejo Hilir yang mengatakan bahwa pelaksanaan program KOTAKU sudah berjalan akan tetapi masih adanya kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan lamanya persetujuan dana yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan program ini, pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan perbaikan sistem drainase dan jalan maupun perbaikan rumah itu sudah dilaksanakan tetapi ada juga yang belum terlaksana.

b. Integrasi LPM dalam Melaksanakan Program

Menurut Duncan dalam Richard M Streets (1985:53), mengatakan bahwa ukuran efektivitas adalah (pencapaian tujuan, intergrasi, dan adaptasi) dimana integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Bedasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, integrasi yang dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Siderejo Hilir sudah baik dinilai dari usaha melalui pembinaan kepada masyarakat mengenai visi, misi, dan tujuan dari program KOTAKU yang kedepannya melalui program ini masyarakat dapat mengetahui dan bekerjasama dengan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bebas kumuh.

Proses integrasi yang diamati penulis dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir juga meliputi pembagian tugas, musyawarah, dan bekerjasama dengan para pihak terkait seperti Badan Keswadayaan Masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh, yang memungkinkan bentuk kerjasama dan pendekatan yang baik kepada masyarakat ini agar terlaksananya program Kota Tanpa Kumuh dapat tercapai sasaran dan tujuannya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber yaitu bapak H. Ahmad selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir yang mengatakan integrasi dengan masyarakat yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dinilai baik melalui kegiatan dan sosialisasi pengenalan program ini merupakan pengerjaan yang membutuhkan swadaya dari masyarakat sehingga dapat bekerjasama dengan para pelaksana agar terciptalah lingkungan yang baik dan layak huni bagi masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir.

c. Sarana dan Prasarana dalam Melaksanakan Program KOTAKU

Menurut Moenir (2000:120) membagi sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses barang yang berlainan fungsi dan gunanya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
3. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan.

Bedasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program KOTAKU di Kelurahan Siderejo Hilir belum lengkap dan tersedia dengan baik dinilai dari kekurangan peralatan, perlengkapan ataupun fasilitas yang dibutuhkan dalam pekerjaan perbaikan sistem drainase maupun lainnya dalam rangka kegiatan program belum menunjukkan sarana dan prasarana yang baik dalam menunjang keberhasilan program. Seharusnya sarana dan prasarana yang digunakan harus dilengkapi seperti material bangunan yang berkualitas, alat-alat berat, dan material bangunan yang tersedia jumlahnya sesuai kebutuhan agenda kerja.

Karena ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang baik dalam pelaksanaan program ini para penyelenggara tidak dapat mempergunakan alat

atau bahan perlengkapan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja, kurangnya dana dan budgeting yang tepat dalam perencanaan kerja menyebabkan sarana dan prasarana sebagai salah satu hambatan. Sedangkan yang diharapkan sebagai pelaksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus menggunakan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai agar tercapainya perbaikan infrastruktur di Kelurahan Siderejo Hilir yang tepat waktu hasilnya dan dapat diterima baik oleh masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara salah satu narasumber yaitu ibu Natalia selaku masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir, mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang dipakai dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh ini belum dapat terpenuhi dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan bahan bahan material yang menjadi sarana ataupun prasarana ini tidak tersedia padahal kegiatan sudah ditetapkan, seharusnya bahan-bahan material ini harus tersedia sehingga pelaksanaan program ini dapat tepat waktu dan sesuai sasaran pengerjaan.

d. Mengevaluasi Hasil Pelaksanaan

Menurut Arifin (2010:5), evaluasi merupakan suatu proses bukan suatu hasil (produk), hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas, sesuatu baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Bedasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, evaluasi hasil dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilihat dari pelaksanaan di Kelurahan Siderejo

Hilir sudah memasuki tahap pengerjaan sistem drainase di lingkungan 9,10,dan 11 pengecoran jalan, dan pendataan perenovasian rumah kumuh. Adapun lingkungan yang memiliki sistem drainase yang tidak baik dan sesuai jalurnya yang mengakibatkan banjir dan sistem pembuangan yang tidak baik. Seharusnya sebagai pelaksana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan para pihak pelaksana melakukan perbaikan drainase dengan merata dan tepat sasaran pengerjaan nya agar tercipta lingkungan yang baik dan anti kumuh. Dapat dilihat dari tabel 4.1 dan tabel 4.2 kegiatan yang di telah dilaksanakan dan yang direncanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU

Tabel 4.1
Kegiatan Pelaksanaan Program KOTAKU

No	Nama Kegiatan	Volume	Waktu Pelaksanaan
1	Pembangunan dinding dasar drainase Lingkungan 8	P = 400 Meter L= 2 meter T= 2 meter	Tahap I
2	Pembangunan dinding dasar drainase lingkungan 9,10,11	P= 750 Meter L= 2 Meter T= 2 Meter	Tahap I
3	Pengecoran Gang.Lurah	1,5 KM	Tahap I/II
4	Pengecoran Gang. Jawa	1 KM	Tahap I/II
5	Pengecoran Gang. Mawar	1,2 KM	Tahap I/II

Sumber: Data 2018

Ada pun kegiatan yang masih direncanakan atau diusulkan dalam pelaksanaan program KOTAKU :

Tabel 4.5
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Renovasi Rumah Ibu.Suyati	Kelayakan Huni 40% dinilai dari atap yang bocor Perbaikan direncanakan dengan penggantian seng dan asbes rumah
2.	Pengecoran Gang Buntu dan Gang. Nanas	Jalanan gang masih berbatu dan susah dilewati
3.	Pembangunan Parit Jalan Tangkul II	Tertunda
4	Pemberian Modal Usaha Ibu Karsinah	Tertunda karena belum ada keterangan pasti
5	Pembangunan Lanjutan Renovasi Lingkungan 3	Pendataan

Sumber: Data 2018

Melalui tabel kegiatan dan pelaksanaan ini dapat dilihat bahwa kegiatan program sudah terlaksana melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan akan tetapi masih terdapat usulan-usulan pelaksanaan perbaikan yang diterima dan dirancang kegiatan nya oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum dapat dilaksanakan karena lamanya persetujuan dana ataupun persetujuan pelaksanaan dari Unit Pengelola Sosial.

Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dari H. Ahmad selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir yang mengatakan bahwa hasil pelaksanaan program belum dikatakan baik dinilai dari keterlambatan waktu pelaksanaan program yang hasilnya belum dapat diterima oleh masyarakat yang menjadikan program berjalan lama dan dari masyarakat menuntut pelaksanaan

yang semaksimal dan secepat mungkin karena pada dasarnya masyarakat menerima baik pelaksanaan program ini di Kelurahan Siderejo Hilir.

Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung belum berjalan secara efektif, dikarenakan dalam pencapaian tujuan belum berjalan dengan baik dilihat dari misi dan strategi yang belum dapat menunjukkan hasil perbaikan Infrastruktur secara menyeluruh dan pemberantasan lingkungan kumuh. Integrasi dalam pelaksanaan program sudah dapat dilaksanakan dengan baik dinilai dari kerjasama LPM dalam proses pelaksanaan, mengenai sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan kerja dari kegiatan program yang akibatnya tertundanya kegiatan pembangunan. Hasil evaluasi dari pelaksanaan program KOTAKU yang dilaksanakan oleh LPM menunjukkan belum baik dan efisien yang dinilai dari hasil kegiatan yang masih tertunda, pelaksanaan yang masih terhambat dana, dan pembangunan belum menyeluruh di Kelurahan Siderejo Hilir.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan hasil dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Efektivitas Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Melaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dapat dikatakan belum efektif, dilihat dari kegiatan yang masih tertunda meskipun beberapa kegiatan dilaksanakan yang dirasa masyarakat sudah berjalan baik tetapi masyarakat membutuhkan pelaksanaan yang sesuai waktu dan capai sasaran, Pelaksanaan Program KOTAKU juga disertai pihak-pihak seperti Badan keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pencapaian Tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) LPM berperan sebagai fasilitator yang menengahi dari setiap pelaksanaan program sehingga sebagai pelaksana LPM dikatakan belum efektif dalam melakukan tugas dan perannya karena hambatan yang terjadi seperti lamanya proses pengajuan dana pelaksanaan program yang mengakibatkan tertundanya kegiatan pelaksanaan. Tujuan dari program KOTAKU untuk mengentaskan lingkungan kumuh di

Kelurahan Siderejo Hilir sudah belum dapat tercapaim maksimal karena masih adanya kegiatan program yang masih tertunda pelaksanaannya .

Sesuai dengan Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) belum dapat melaksanakan dengan baik program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) akan tetapi LPM sudah mampu berperan baik dalam pengintegrasian dalam pelaksanaan program melalui bentuk kerjasama yang baik dengan para pelaksana yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat melakukan sosialisasi dengan masyarakat dalam melaksanakan program sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik.

Pelaksanaan program KOTAKU sudah dapat diterima baik oleh masyarakat dari segi partisipasi dan antusias akan tetapi melalui hasil pelaksanaan kerja yang kurang maksimal menjadikan pelaksanaan program KOTAKU belum berjalan efektif di Kelurahan Siderejo Hilir, diharapkan kedepannya program Kota Tanpa Kumuh dapat berjalan lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Siderejo Hilir dan rencana kegiatan dari program KOTAKU dapat terlaksanakan dengan segera kedepannya.

B. Saran

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian, dimana saran sebagai masukan bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang.

1. Diharapkan kepada Pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih bersinergi atau lebih baik dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik dalam memberdayakan maupun sosialisasi program lainnya selain KOTAKU karena program KOTAKU sangat diterima baik oleh masyarakat.
2. Diharapkan Kepada Unit Pengelola Sosial KOTAKU lebih cepat tanggap kepada pengajuan proses pembangunan sehingga dalam pelaksanaan program KOTAKU dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan tujuan program secara baik.
3. Diharapkan Kepada Kelurahan Siderejo Hilir dapat mengembangkan program ini dan mempertahankannya karena Program KOTAKU dapat menjadi solusi pembangunan khususnya diperkotaan.
4. Perlu ditingkatkan lagi budgeting yang diajukan kepada pihak-pihak stakeholder agar pelaksanaan Program dapat berjalan lebih baik dan tidak hanya mengharapkan dari dana tunjangan program.
5. Dalam menangani atau menanggulangi masalah dalam pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat harus mengambil langkah cepat dan tanggap agar tidak terjadi masalah yang menjadikan pelaksanaan program menjadi tertunda.
6. Diperlukan perhatian dari pusat kota ataupun pusat program KOTAKU agar secara menyeluruh memperbaiki sistem pelaksanaan yang seharusnya sudah memenuhi kebutuhan perbaikan di setiap tingkat kelurahan agar tercapainya tujuan dari program KOTAKU dalam melakukan pembangunan yang anti

kumuh dan melakukan pembangunan infrastruktur yang secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan, 2005, *Transormasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Jogjakarta.
- Arifin, Zainal, 2010, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Gie, The Liang, 2000, *Administrasi Perkantoran Modern*,Pustaka NasionalPtc.Ltd, Singapura
- , 2007, *Administrasi Perkantoran Modern : Edisi Keempat*,Liberty, Jogjakarta.
- Handoko T. Hani , 2001, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi ke 2* , BPFE, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- Martoyo, Susilo , 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi ke 8* , BPFE, Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S , 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara,Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- , 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Salam, Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan,Jakarta.
- Siagian, S.P , 2002, *Kiat meningkatkan produktivitas kerja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Managemen Sumber Daya Manusia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Silalahi, Ulbar, 2002, *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Mandar Maju,Jakarta.
- Streers, M. Richard , 1985, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono,2010, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan, kuantitatif, kualitatifDan R&D)*, Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan, kuantitatif, kualitatif Dan R&D): Cetakan ke 11*, Alfabeta, Bandung.

Sumaryadi I nyoman, 2005, *Pengantar Management*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Undang- Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007

Website

<http://www.materibelajar.id/2015/12/tugas-fungsi-lembaga-pemberdayaan.html#>

http://www.kotaku.pu.go.id/web_kotaku/public/cat/40

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ADE TYA DWI PUTRI
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 25 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Jln Kemenangan no 158 , Kota Medan.
Anak Ke : 4 (Empat) dari 4 (Empat) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Suharto
Ibu : Rostina Lubis

Pendidikan

1. Tamatan SD Swasta Umi Fatimah Tahun 2008
2. Tamatan SMP Negeri 27 Medan Tahun 2011
3. Tamatan SMK Swasta Farmasi Apipsu Medan 2014
4. Menyelesaikan Program S-1 Tahun 2014 s/d 2018, Jurusan Ilmu Administrasi Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Maret 2018

Penulis

ADE TYA DWI PUTRI

1403100100

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Kantor Lurah Siderejo Hilir Kota Medan

Nama Narasumber : Himpun Suriadi

Jabatan : Staf Kelurahan

Alamat : Jln. Dahlia no 17 Medan

A. Pencapaian Tujuan

a. Apakah hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat?

Jawab: Yang dilaksanakan belum sesuai karena ada agenda yang masih tertunda dan agenda tersebut perbaikan yang butuhkan masyarakat seperti renovasi salah satu masyarakat yang masih tertunda.

b. Bagaimana strategi LPM dalam mencapai tujuan kerja dan tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menciptakan lingkungan yang anti kumuh dan perbaikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih baik lagi?

Jawab: Strategi biasanya mulai dari pelaksanaan yang baik mulai dari menentukan sasaran pengerjaan hingga proses pengerjaan yang signifikan sehingga apa yang ditujukan tercapai sesuai dengan indikator kekumuhan dan perbaikan infrastruktur (Jalan, pengecoran Gang, renovasi rumah kumuh).

c. Bagaimana Prosedur LPM dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Prosedurnya sama seperti panduan kerja dari program, pertama penentuan sasaran, kedua proses budgeting pembiayaan berapa yang harus dikeluarkan dalam pengerjaan nanti, ketiga pengajuan , keempat kalau disetujui akan dilaksanakan sesuai budget lalu setelah selesai kita laporkan ke pusat laporannya.

d. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Kendala nya itulah penyetujuan pelaksanaan yang kita ajukan dari pihak lapangan lama di respon dari unit pelaksana sosial setiap pelaksanaan harus atas persetujuan dari unit penyelenggara.

2. Integrasi

a. Bagaimana keterkaitan Kelurahan dan BKM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Keterkaitan nya sangat terkait karena umumnya pelaksanaan program kotaku ini dilaksanakan oleh BKM , tapikan BKM organisasi masyarakat yang membutuhkan fasilitator, disitulah peran LPM sebagai fasilitator daripihak kelurahan yang berperan bersampingan dalam pengerjaan program ini.

b. Bagaimana kordinasi dari kecamatan kepada kelurahan dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Tidak ada kordinasi khusus karena dalam penyelenggaraan program, program langsung naungan kelurahan.

c. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Yang terlibat lurah mengetahui, stafnya, pelaksana umumnya BKM, LPM sebagai fasilitatornya ada juga tim pelaksana dari program KOTAKU karena kotakumuh inikan dari dinas perumahan dan pemukiman ke kelurahan dan masyarakat lah .

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat mengenai pelaksanaan Kota tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM ?

Jawab: Tanggapan nya sangat baik dan baguslah kata masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

a. Apa sajakah sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Sarana dan prasarana nya alat-alat dalam pelaksanaan program, ya kalau lagi ngecor jalan atau gang bahan bangunan ,bako cangkul, pasir dll.

b. Apakah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan baik ?

Jawab: Ya dapat digunakan dengan baik

c. Apakah ada kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana ini kan relatif, kalau bahan habis kita beli, kalau dana kurang ya tertunda pengerjaannya.

d. Jika ada kendala bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Tidak ada kendala

4. Mengevaluasi Hasil

a. Bagaimana pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung ?

Jawab: Pelaksanaan program KOTAKU umumnya berjalan baik, tetapi kegiatan ada yang tertunda dan mengakibatkan program ini menjadi belum terlaksana dengan baik.

b. Apakah dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) LPM dan Pihak-Pihak terlibat mengalami hambatan ?

Jawab: Hambatan seperti persetujuan dana saja dari Unit Pelaksana Program KOTAKU.

c. Hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi LPM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Jawab: Hambatan nya seperti kehabisan bahan, atau lama nya persetujuan dana yang membuat pengerjaan tertunda.

d. Bagaimana cara LPM mengatasi hambatan – hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Kalaupun ada hambatan yang terjadi, LPM akan bermusyawarah dengan para pihak terlibat mengenai dana apakah diadakan urunan dana atau menunggu dana disetujui sehingga dapat melanjutkan pelaksanaan program.

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Kantor Lurah Siderejo Hilir Kota Medan

Nama Narasumber : Mirza Marzuki
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Alamat : Jalan Tuamang no 14 , Kota Medan

1. Pencapaian Tujuan

a. Apakah hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM sudah sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat ?

Jawab: Belum tercapai sepenuhnya, karena da pengerjaan yang tertunda akibat minim dana.

b. Bagaimana strategi LPM dalam mencapai tujuan kerja dan tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menciptakan lingkungan yang anti kumuh dan perbaikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih baik lagi ?

Jawab: strateginya yaitu dengan bentuk kerja sama dengan para pihak yang terlibat pelaksanaan program sehingga peran dan tugas dari pihak-pihak ini mampu menukung pelaksanaan yang efektif, seperti pembagian tugas LPM seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

c. Bagaimana prosedur LPM dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Prosedur dalam pelaksanaan program dimulai dari sosialisasi kepada

masyarakat , penentuan indikator kekumuhan dan sasaran pembangunan, kordinasi dengan BKM mengenai budget pelaksanaan, dan akhirnya proses pelaksanaan program disertai laporan.

c. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Persetujuan dana saja yang susah, selanjutnya kalau kegiatan dan rencana kerja sudah kita rencanakan.

2. Integrasi

a. Bagaimana keterkaitan Kelurahan dan BKM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Kaitannya sangat kuat karena BKM salah satu badan yang ditunjuk khusus dalam pemetaan pelaksanaan program ditingkat kelurahan, LPM menjadi mitra dan sekaligus menjadi fasilitator dalam pelaksanaan ini jadi setiap kegiatan pelaksanaan kita kordinasikan pembagian tugasnya.

b. Bagaimana Kordinasi dari kecamatan kepada kelurahan dalam melaksanakan program kerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Tidak ada kordinasi karena program KOTAKU langsung program di Kelurahan.

c. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

Jawab: Yang terlibat dalam pelaksanaan program Unit Pelaksana Program, LPM

BKM, diketahui lurah, dan pastinya masyarakat.

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat mengenai pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM ?

Jawab: Tanggapan masyarakat sangat baik.

3. Sarana dan Prasarana

a. Apa sajakah sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Sarana dan prasarana yang dipakai dalam pelaksanaan adalah bahan bangunan dan alat-alat nya seperti semen, batu, pasir,dll.

b. Apakah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan baik ?

Jawab: Ya dapat dipakai dengan baik.

c. Apakah ada kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Tidak ada kendala khusus, mungkin kurang bahan sedikit-sedikit ya bisalah ditutupi.

d. Jika ada kendala bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Minta bantuan ke Unit pelaksana sosial program atau menunggu persetujuan dana kalau bahan bahan bangunan kurang.

4. Mengevaluasi Hasil

a. Bagaimana pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung ?

Jawab: Untuk pelaksanaan program di kelurahan dirasa sudah cukup baik, karena kelurahan kita tidak termasuk tingkat kumuh yang tinggi persentasenya.

b. Apakah dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) LPM dan Pihak- Pihak terlibat mengalami hambatan ?

Jawab: Hambatan nya bahan kurang , waktu mau beli dana kurang karena dana minim dan rencana kerja sudah tertata harus tertunda.

c. Hambatan apa saja yang dapat memperngaruhi LPM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Dana yang sudah pasti ,Kerjasama antar anggota mungkin, tapi tidak terjadi sejauh ini.

d. Bagaimana cara LPM mengatasi hambatan – hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Melakukan diskusi dengan para pihak terkait sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Kantor Lurah Siderejo Hilir Kota Medan

Nama Narasumber : Harry Suryono

Jabatan : Anggota BKM dan Ketua Program KOTAKU

Alamat : Jalan Tuasan no 19, Kota Medan.

1. Pencapaian Tujuan

a. Apakah hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM sudah sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat ?

Jawab: Bisa dibilang sudah sesuai karena program KOTAKU memperuntukkan ke masyarakat, tapi ada juga pengerjaan yang belum jd mungkin belum semua tercapai.

b. Bagaimana strategi LPM dalam mencapai tujuan kerja dan tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menciptakan lingkungan yang anti kumuh dan perbaikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih baik lagi ?

Jawab: Strateginya adalah bentuk kerjasama dengan baik antar anggotanya sehingga dalam pelaksanaan berjalan baik.

c. Bagaimana prosedur LPM dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Prosedurnya sama seperti panduanprogram yaitu pemetaan sasaran pengerjaan, penentuan kekumuhan, budgeting , lalu pelaksanaan pengerjaan.

d. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawaban: Kendala yang khusus tidak ada sepenghlihatan saya.

2. Integrasi

a. Bagaimana keterkaitan Kelurahan dan BKM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Sangat terkait, karena BKM menjadi penggerak ditingkat kelurahan dan LPM sebagai fasilitator dalam kegiatan pelaksanaan ini.

b. Bagaimana Kordinasi dari kecamatan kepada kelurahan dalam melaksakan program kerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Tidak ada kordinasi karena program ini program memang dipusatkan dikelurahan.

c. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

Jawab: LPM, BKM, Unit Pelaksana Sosial, diketahui kelurahan dan masyarakat.

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat mengenai pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM ?

Jawab: Tanggapan nya baik dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan, dll.

3. Sarana dan Prasarana

a. Apa sajakah sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Sarana dan Prasarana yang digunakan di pelaksanaan ini seperti beko, bahan bangunan, pasir dll.

b. Apakah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan baik ?

Jawab: Ya dapat dipergunakan dengan baik

c. Apakah ada kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Sejauh paling cumalamanya persetujuan dana saja.

d. Jika ada kendala bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Cara mengatasinya kembali lagi dengan cara swadaya dan gotong royong.

4. Mengevaluasi Hasil

a. Bagaimana pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung ?

Jawaban: Sudah cukup terlaksana dengan baik.

b. Apakah dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) LPM dan Pihak-Pihak terlibat mengalami hambatan ?

Jawab: Seperti lama nya persetujuan dana saja dan kegiatan jadi tertunda.

c. Hambatan apa saja yang dapat memperngaruhi LPM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawaban: Dana, dan kerjasama.

d. Bagaimana cara LPM mengatasi hambatan – hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Musyawarah antara pelaksana bagaimana mengambil langkah alternatif.

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir Kota Medan

Nama Narasumber : H. Ahmad

Alamat : Jalan Tangkul II no 115 Kota Medan.

1. Pencapaian Tujuan

a. Apakah hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM sudah sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat ?

.Jawab: Ya karena saluran drainase sudah diperbaiki, tapiada juga pengerjaan yang tertunda.

b. Bagaimana strategi LPM dalam mencapai tujuan kerja dan tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menciptakan lingkungan yang anti kumuh dan perbaikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih baik lagi ?

Jawab: Strateginya saya rasa melalui sosialisasi dan pengikutsertaan masyarakat.

c. Bagaimana prosedur LPM dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Yang saya ketahui selama saya amati sosialisasi kepada kami (masyarakat) Penentuan lingkungan kumuh, dan proses pengerjaan.

d. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Kurang tau.

2. Integrasi

a. Bagaimana keterkaitan Kelurahan dan BKM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya ketahui BKM sama sama melaksanakan pengerjaan dan yang waktu sosialisasi dari LPM.

b. Bagaimana Kordinasi dari kecamatan kepada kelurahan dalam melaksakan program kerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya kurang tau.

c. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

Jawab: Yang saya ketahui Pihak kelurahan, LPM, BKM, dan Masyarakat.

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat mengenai pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM ?

Jawab: Kami sangat antusias karena perbaikan drainase sangat dibutuhkan dan juga lainnya.

3. Sarana dan Prasarana

a. Apa sajakah sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Bahan bangunan seperti semen, batu, pasir, cangkul, dll.

b. Apakah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh

(KOTAKU) dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan baik ?

Jawab: Ya dapat digunakan dengan baik

c. Apakah ada kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya rasa tidak

d. Jika ada kendala bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: saya rasa tidak ada.

4. Evaluasi

a. Bagaimana pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung ?

Jawab: Sejauh ini yang saya ketahui baik dan sudah sesuai sasaran.

b. Apakah dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) LPM dan Pihak-Pihak terlibat mengalami hambatan ?

Jawaban: Saya rasa tidak ada.

c. Hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi LPM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawaban: Mungkin LPM lebih mengetahui, dari masyarakat tidak ada.

d. Bagaimana cara LPM mengatasi hambatan – hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawaban: Tidak ada tergantung dari pihak LPM bagaimana mengatasinya

DAFTAR WAWANCARA

Untuk Masyarakat di Kelurahan Siderejo Hilir Kota Medan

Nama Narasumber : Natalia

Alamat : Jalan Tangkul II no 160 Kota Medan.

1. Pencapaian Tujuan

a. Apakah hasil pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM sudah sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat ?

Jawab: Ya karena saluran drainase sudah diperbaiki dan ada rumah kumuh yang mulai diperhatikan.

b. Bagaimana strategi LPM dalam mencapai tujuan kerja dan tujuan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam menciptakan lingkungan yang anti kumuh dan perbaikan fasilitas maupun sarana dan prasarana yang lebih baik lagi ?

Jawab: Strateginya saya rasa melalui sosialisasi kepada masyarakat dan prosedurnya lah.

c. Bagaimana prosedur LPM dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya kurang tau tapi melalui sosialisasi itu mungkin itu tahap awal.

d. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya Kurang tau.

2. Integrasi

a. Bagaimana keterkaitan Kelurahan dan BKM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Yang saya liat di waktu sosialisasi pihak kelurahan dan LPM itu yang melakukan sosialisasi, BKM menanyakan kepada kami dilingkungan rumah siapa yang rusak dan tergolong tidak mampu.

b. Bagaimana Kordinasi dari kecamatan kepada kelurahan dalam melaksakan program kerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya kurang tau

c. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)?

Jawab: BKM, LPM, Kelurahan, Masyarakat.

d. Bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat mengenai pelaksanaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan oleh LPM ?

Jawab: Saya sebagai masyarakat menganggap baik karena ini diperuntukkan untuk masyarakat dan orang yang tidak mampu.

3. Sarana dan Prasarana

a. Apa sajakah sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Yang saya ketahui Bahan bahan untuk bangunan biasanya pasir semen dll.

b. Apakah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat menggunakan sarana dan prasarana dengan baik ?

Jawab: Ya baik

c. Apakah ada kendala dalam penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Tidak ada saya rasa.

d. Jika ada kendala bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?

Jawab: Tidak ada .

4. Evaluasi

a. Bagaimana pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung ?

Jawab: Sudah cukup baik tapi ada katanya mau renovasi rumah salah satu tetangga tapi belum terlaksana.

b. Apakah dalam melaksanakan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) LPM dan Pihak-Pihak terlibat mengalami hambatan ?

Jawab: Kurang Mengetahui.

c. Hambatan apa saja yang dapat memperngaruhi LPM dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Pendanaan mungkin.

d. Bagaimana cara LPM mengatasi hambatan – hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ?

Jawab: Saya kurang mengetahui.